

EVALUASI INDIKATOR KOTA LAYAK HUNI: STUDI KASUS KOTA SURAKARTA

Muhammad Farid Anshori¹

¹ Program Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Gadjah Mada

¹ Email : wakeden10@gmail.com

Diterima (received): 17 Juli 2025

Disetujui (accepted): 24 Agustus 2026

ABSTRAK

Kota Surakarta dinobatkan sebagai kota paling layak huni di Indonesia oleh Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP) pada tahun 2022 dengan skor indeks 77. Namun, di balik capaian tersebut masih terdapat permasalahan mendasar, seperti permukiman kumuh, ketimpangan akses layanan dasar, dan sistem transportasi yang belum inklusif, sehingga akurasi penilaian tersebut perlu dikaji. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kesesuaian antara kondisi riil Kota Surakarta dan indikator Indonesia's Most Livable City Index (MLCI) dari IAP menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui studi dokumentasi, observasi lapangan, dan wawancara mendalam dengan pihak terkait, kemudian divalidasi melalui triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara predikat layak huni secara formal dan kondisi aktual, terutama pada Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik yang baru mencapai sekitar 9% dari luas wilayah serta keterbatasan akses hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Temuan ini mengindikasikan bahwa indikator yang digunakan belum sepenuhnya merepresentasikan kebutuhan masyarakat secara adil dan inklusif, sehingga diperlukan penyempurnaan indikator yang lebih kontekstual dan responsif terhadap kompleksitas perkotaan.

Kata Kunci: Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia; kota layak huni; Livable City Index; Kota Surakarta.

ABSTRACT

Surakarta was named the most livable city in Indonesia by the Indonesian Association of Urban and Regional Planners (IAP) in 2022, with an index score of 77. However, fundamental problems persist behind this achievement, including slum settlements, unequal access to basic services, and a transportation system that is not yet inclusive, which calls the accuracy of the assessment into question. This study evaluates the alignment between the actual conditions of Surakarta and the indicators of IAP's Indonesia's Most Livable City Index (MLCI) using a descriptive qualitative approach. Data were collected through document review, field observation, and in-depth interviews with relevant stakeholders, and were validated through triangulation. The results reveal a gap between the city's formal livability status and its actual conditions, particularly in public Green Open Space (RTH), which covers only about 9% of the city area, and in limited access to adequate housing for low-income groups. These findings indicate that the current indicators do not yet fully represent community needs

in a fair and inclusive manner, highlighting the need for more contextual indicators that respond to the complexity of urban realities.

Keywords: *Indonesian Association of Urban and Regional Planners; livable city; Livable City Index; Surakarta.*

A. PENDAHULUAN

Kelayakan huni (livability) kota umumnya dipahami sebagai kemampuan kota menyediakan penghidupan yang layak bagi warganya sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan (Evans, 2002), dan semakin menjadi dasar kerja sama maupun daya saing antarkota (Douglass, 2002). Wina, ibu kota Austria, misalnya, menduduki peringkat teratas kota paling layak huni versi Economist Intelligence Unit pada tahun 2022 berdasarkan lima aspek utama, yaitu stabilitas, layanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, serta budaya dan lingkungan. Dengan luas sekitar 414,6 km² dan populasi 1,8 juta jiwa, Wina mempertahankan reputasinya berkat pelayanan publik yang unggul, ruang terbuka hijau yang luas, biaya hidup yang relatif terjangkau, serta kemudahan akses terhadap transportasi, perumahan, dan layanan dasar.

Di Indonesia, Kota Surakarta meraih peringkat tertinggi dalam Indonesia's Most Livable City Index (MLCI) tahun 2022 yang disusun oleh Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP). Penilaian tersebut melibatkan 52 kota di 32 provinsi, dan Surakarta memperoleh skor tertinggi, yaitu 77, mengungguli kota lain seperti Yogyakarta dan Semarang. Namun, capaian ini tidak serta-merta mencerminkan kondisi riil di lapangan. Urbanisasi yang cepat, ketimpangan akses layanan publik, dan keterbatasan pengelolaan lingkungan hidup menunjukkan adanya celah antara penilaian formal dan kenyataan yang dihadapi warga sehari-hari.

Salah satu isu yang paling mencolok adalah luasnya kawasan permukiman kumuh. Berdasarkan SK Kumuh tahun 2020, luas kawasan kumuh di Surakarta mencapai lebih dari 145 hektare, dan hingga akhir 2022 masih tersisa lebih dari 87 hektare yang belum tertangani secara optimal. Sektor transportasi juga masih menghadapi tantangan, seperti minimnya jalur sepeda, buruknya kondisi trotoar, dan lemahnya integrasi antarmoda. Ketidaksesuaian antara predikat kota paling layak huni dan kondisi faktual tersebut menimbulkan pertanyaan tentang akurasi sistem penilaian yang digunakan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk (1) mengevaluasi kriteria dan indikator yang digunakan dalam menetapkan Surakarta sebagai kota layak huni dan (2) menilai kesesuaian kondisi eksisting Surakarta dengan indikator tersebut, sebagai masukan bagi penyusunan kebijakan yang lebih kontekstual dan inklusif.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan logika deduktif, yaitu berangkat dari teori dan indikator yang telah ada untuk kemudian diverifikasi dengan data lapangan. Kajian mencakup dua dimensi: (1) dimensi konseptual, berupa kriteria dan indikator kota layak huni yang meliputi kualitas lingkungan, layanan sosial, ekonomi, dan keamanan; serta (2) dimensi empiris, berupa kondisi aktual Kota Surakarta berdasarkan indikator tersebut. Unit analisis terdiri atas kriteria penilaian kota layak huni IAP dan elemen livabilitas Kota Surakarta,

sedangkan unit amatan mencakup lima kecamatan, yaitu Banjarsari, Jebres, Laweyan, Pasar Kliwon, dan Serengan, untuk menangkap variasi spasial dan sosial kota.

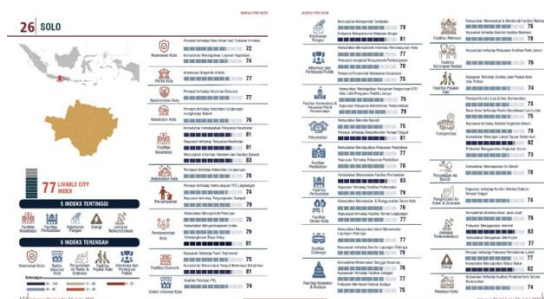
Data dikumpulkan melalui studi literatur dan dokumentasi, observasi lapangan pada lokasi strategis (kawasan permukiman, ruang terbuka publik, fasilitas umum, dan sistem transportasi), serta wawancara mendalam dengan pihak terkait. Validitas temuan diperkuat melalui triangulasi sumber dan metode. Variabel analisis meliputi delapan aspek, yaitu keamanan, kesehatan, ekonomi, hunian, pendidikan, pelayanan publik, ruang terbuka, dan mobilitas, yang disarikan dari Kashef (2016), EIU (2019), dan IAP (2022). Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif dalam dua tahap: pertama, menelaah dokumen dan teori penilaian kota layak huni untuk menyusun indikator evaluasi; kedua, mengevaluasi kesesuaian kondisi aktual Surakarta dengan indikator tersebut.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Evaluasi Kriteria Penilaian dalam Penetapan Kota Surakarta sebagai Kota Layak Huni

Kota Surakarta dinobatkan sebagai kota paling layak huni dalam MLCI 2022 karena dinilai mampu memenuhi berbagai aspek kelayakan hidup, seperti keamanan, kesehatan, ekonomi, layanan publik, hunian, ruang terbuka, mobilitas, dan inklusivitas. Penilaian MLCI menggunakan metode partisipatif yang menggabungkan survei persepsi warga dengan data sekunder dari lembaga resmi, yang kemudian diklasifikasikan ke dalam 28 indikator. Pendekatan ini memungkinkan kualitas hidup ditangkap tidak hanya dari statistik makro, tetapi juga dari pengalaman langsung warga.

Dengan skor 77, capaian tertinggi Surakarta terdapat pada kemudahan akses layanan publik dan pendidikan (masing-masing 81), ketersediaan pangan (79), kepemilikan hunian layak (78), serta layanan kesehatan masyarakat (77) (Gambar 1). Skor tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan dasar warga relatif terpenuhi secara merata dan terjangkau.



Gambar 1. Penetapan Surakarta sebagai Kota dengan Indeks Tertinggi
(Sumber: IAP, 2022)

Sebaliknya, lima indikator dengan skor terendah adalah perlindungan terhadap kriminalitas dan pelayanan administrasi kependudukan (masing-masing 72), serta ruang terbuka hijau, kualitas perumahan publik, dan pengelolaan sektor informal (masing-masing 74). Hal ini menunjukkan bahwa kualitas hidup di Surakarta belum

sepenuhnya ideal, terutama dalam hal keamanan, keberlanjutan ruang kota, dan tata kelola sosial-ekonomi yang inklusif.

Evaluasi 28 Indikator (IAP, 2022)

Ke-28 indikator MLCI mencakup aspek keamanan dan keselamatan, politik lokal, kesehatan, kebersihan, air bersih, penataan kota, pangan, pendidikan, fasilitas kelompok rentan, kesenian dan budaya, rekreasi, transportasi, telekomunikasi, energi, serta pengelolaan limbah. Setiap indikator dinilai melalui parameter yang menggabungkan data kuantitatif dan persepsi warga terhadap kualitas layanan serta kenyamanan hidup (IAP, 2022).

Untuk menyelaraskannya dengan kerangka internasional, yaitu The Global Liveability Index (EIU, 2019) dan pendekatan multidisipliner Kashef (2016), ke-28 indikator IAP dipetakan ulang dan disederhanakan menjadi 16 indikator utama. Penyederhanaan ini bertujuan mengurangi tumpang tindih antarindikator yang menilai aspek serupa, memperkuat validitas kerangka nasional, serta memudahkan perbandingan antarkota maupun antarnegara. Keenam belas indikator tersebut diuraikan sebagai berikut.

a. Kualitas Udara Kota

Indikator "Kebersihan Kota" disesuaikan menjadi "Kualitas Udara Kota" dengan fokus pada polusi udara dan dampaknya terhadap kesehatan. Kashef (2016) memandang kualitas udara sebagai elemen krusial hunian yang layak, sedangkan EIU (2019) menyatakan bahwa rendahnya kualitas udara menurunkan kelayakan kota.

b. Ruang Terbuka Hijau Kota

Indikator "Fasilitas Taman Kota" diubah menjadi "Ruang Terbuka Hijau Kota" untuk menonjolkan fungsi ekologis dan sosial ruang publik, termasuk perannya bagi rekreasi, kesehatan mental, dan budaya (Kashef, 2016; EIU, 2019).

c. Penataan Ruang Kota

Indikator "Penataan Kota" dikembangkan menjadi "Penataan Ruang Kota" yang mencakup perencanaan tata ruang, keteraturan jalan, dan estetika lingkungan. Kashef (2016) menekankan desain dan integrasi spasial, sejalan dengan aspek infrastruktur dalam EIU (2019).

d. Kualitas Permukiman Kota

Indikator "Perumahan" diubah menjadi "Kualitas Permukiman Kota" yang mencakup kondisi bangunan, sanitasi, dan kepadatan. EIU (2019) menempatkan hunian layak sebagai bagian infrastruktur kota, sedangkan Kashef (2016) memandangnya sebagai fondasi kehidupan urban yang bermartabat.

e. Pelayanan Pangan Kota

Indikator "Ketersediaan Pangan" disempurnakan menjadi "Pelayanan Pangan Kota" yang mencakup ketersediaan, distribusi, dan akses pangan sebagai elemen ketahanan sosial perkotaan (Kashef, 2016; EIU, 2019).

f. Pelayanan Pendidikan Kota

Indikator "Fasilitas Pendidikan" direvisi menjadi "Pelayanan Pendidikan Kota" yang mencakup akses, mutu, dan pemerataan layanan pendidikan sebagai pilar kelayakan kota (EIU, 2019) dan pembangunan sumber daya manusia (Kashef, 2016).

g. Pelayanan Kesehatan Kota

Indikator "Kesehatan Kota" dan "Fasilitas Kesehatan" digabung menjadi "Pelayanan Kesehatan Kota" yang mencakup layanan medis, infrastruktur kesehatan, dan persepsi warga terhadap sistem kesehatan sebagai penentu utama kualitas hidup urban (Kashef, 2016; EIU, 2019).

h. Pelayanan Rekreasi Kota

Indikator "Fasilitas Rekreasi", "Olahraga", serta "Kesenian dan Budaya" dikonsolidasikan menjadi "Pelayanan Rekreasi Kota" yang mencerminkan gaya hidup, hiburan, dan ruang ekspresi warga. Kashef (2016) menekankan nilai sosialnya, sedangkan EIU (2019) menggolongkannya dalam aspek budaya dan lingkungan.

i. Pelayanan Transportasi Kota

Indikator "Transportasi" dan "Fasilitas Pejalan Kaki" digabung menjadi "Pelayanan Transportasi Kota" yang mengukur keterjangkauan, kualitas, dan keterhubungan sistem transportasi. EIU (2019) memasukkannya dalam kategori infrastruktur, sedangkan Kashef (2016) memandang transportasi publik sebagai pengikat utama antarfungsi kota.

j. Pelayanan Kelistrikan Kota

Indikator "Kelistrikan" disesuaikan menjadi "Pelayanan Kelistrikan Kota" dengan penekanan pada stabilitas, keterjangkauan, dan pemerataan akses listrik sebagai komponen infrastruktur kota yang modern dan efisien (Kashef, 2016; EIU, 2019).

k. Pelayanan Air Minum Kota

Indikator "Pengelolaan Air Bersih" diubah menjadi "Pelayanan Air Minum Kota" yang menilai pasokan, distribusi, dan mutu air. Akses air minum layak merupakan hak dasar sekaligus cerminan kesejahteraan perkotaan (Kashef, 2016; EIU, 2019).

l. Partisipasi Kota

Indikator "Politik Kota" dan "Fasilitas Administrasi" digabung menjadi "Partisipasi Kota" yang menilai akses warga dalam proses pemerintahan dan pelayanan publik, sebagai cerminan kualitas tata kelola dan rasa memiliki warga terhadap kotanya (Kashef, 2016; EIU, 2019).

m. Kemampuan Memiliki Rumah

Indikator baru ini melengkapi aspek kualitas hunian dengan menyoroti keterjangkauan akses terhadap tempat tinggal, sejalan dengan penekanan EIU (2019) dan Kashef (2016) pada keadilan sosial dan pengendalian biaya hidup.

n. Kesempatan Bekerja

Indikator "Perekonomian", "Fasilitas Ekonomi", dan "Sektor Informal" disatukan menjadi "Kesempatan Bekerja" yang menilai kemampuan kota menciptakan lapangan kerja, dengan mengacu pada daya beli dan stabilitas ekonomi (EIU, 2019) serta inklusi ekonomi dan kewirausahaan lokal (Kashef, 2016).

o. Keamanan Kejahatan Kota

Indikator "Keamanan", "Keselamatan", dan "Fasilitas Keamanan" digabung menjadi "Keamanan Kejahatan Kota" yang menilai persepsi warga terhadap kriminalitas dan efektivitas penegakan keamanan. Keamanan merupakan faktor kunci stabilitas wilayah (EIU, 2019) sekaligus pembentuk kepercayaan sosial (Kashef, 2016).

p. Keamanan Bencana Kota

Indikator "Drainase dan Air Kotor", "Kelompok Rentan", "Peribadatan", serta "Informasi dan Komunikasi" digabung menjadi "Keamanan Bencana Kota" yang mengevaluasi kesiapsiagaan kota menghadapi bencana. Sanitasi, sistem komunikasi, dan perlindungan kelompok rentan merupakan elemen penting ketahanan perkotaan (Kashef, 2016; EIU, 2019).

Penyederhanaan tersebut membuat evaluasi lebih efisien, memudahkan perumusan kebijakan melalui variabel yang lebih ringkas, meningkatkan keterbacaan hasil bagi masyarakat dan pengambil keputusan, serta menghemat waktu dan biaya survei sehingga evaluasi dapat dilakukan secara berkelanjutan. Bagi Surakarta, hal ini relevan mengingat tantangan tata kelola seperti keterbatasan RTH, kualitas udara, dan akses transportasi; misalnya, penggabungan indikator mobilitas menjadi "Pelayanan Transportasi Kota" mempertajam analisis pada aspek konektivitas, kenyamanan, dan keterjangkauan.

2. Kesesuaian Kondisi Eksisting Kota Surakarta dengan Indikator Kota Layak Huni

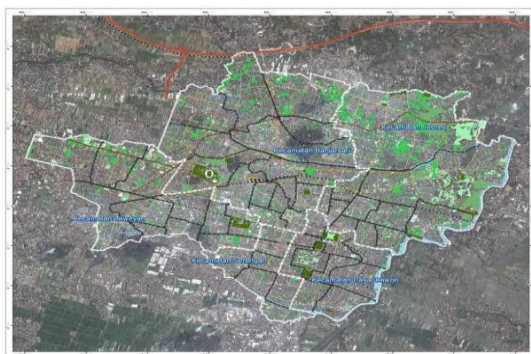
a. Kualitas Udara Kota

Kualitas udara merupakan prasyarat lingkungan yang sehat bagi warga kota. Di Surakarta, tekanan terhadap kualitas udara terutama berasal dari tingginya volume lalu lintas, aktivitas industri ringan, dan kepadatan kawasan perkotaan.

Berdasarkan data Indeks Kualitas Udara (IKU) tahun 2024 dari DLH Kota Surakarta, kawasan barat dan tenggara kota memiliki kualitas udara yang lebih rendah dibandingkan wilayah lain akibat tingginya lalu lintas, industri ringan, dan urbanisasi yang padat. Meskipun kualitas udara secara umum membaik, distribusinya belum merata dan belum sepenuhnya memenuhi standar kota layak huni. Pemerintah telah berupaya menekan emisi dan memperluas ruang hijau, tetapi terkendala keterbatasan lahan dan kepadatan kendaraan, sehingga diperlukan pemantauan yang konsisten dan kebijakan yang responsif.

b. Ruang Terbuka Hijau Kota

Ruang Terbuka Hijau (RTH) berperan sebagai penyeimbang ekosistem, ruang sosial, dan elemen estetika kota. Namun, RTH publik di Surakarta baru mencapai sekitar 9% dari luas wilayah, jauh di bawah ketentuan nasional sebesar 20% maupun target minimum RTRW sebesar 12%. Kondisi ini diperburuk oleh keterbatasan lahan akibat urbanisasi yang pesat, sehingga pemerintah mulai mengadopsi pendekatan indeks hijau-biru untuk mengoptimalkan vegetasi dan elemen air (Gambar 2).

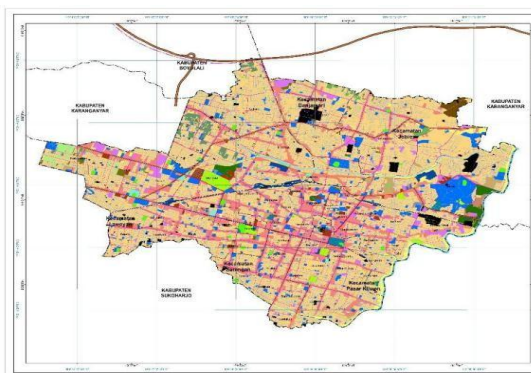


Gambar 2. Peta Ruang Terbuka Hijau (RTH) Eksisting Kota Surakarta (DLH, 2024)

Dokumentasi DLH Kota Surakarta (2024) menunjukkan bahwa kawasan Keraton berpotensi strategis bagi pelestarian vegetasi khas Jawa Tengah karena keanekaragaman floranya tergolong sedang hingga tinggi, meskipun tidak ditemukan spesies endemik. Sebaliknya, keanekaragaman burung masih rendah hingga sedang, yang mengindikasikan tekanan ekologis atau terbatasnya habitat alami. Surakarta belum memiliki kawasan lindung permanen, sehingga konservasi dilakukan melalui pengelolaan hutan kota dan taman kota sebagai RTH multifungsi. Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa proporsi dan sebaran RTH belum memadai, daya dukung ekologisnya rendah, dan menurut persepsi warga ruang hijau yang ada belum nyaman dan merata. Dengan demikian, indeks hijau-biru merupakan langkah positif, tetapi belum dapat menggantikan fungsi ekologis dan sosial RTH yang ideal, sehingga diperlukan strategi jangka panjang untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas RTH.

c. Penataan Ruang Kota

Kebijakan penataan ruang di Surakarta difokuskan pada desentralisasi pusat aktivitas dan pengembangan vertikal untuk mengatasi keterbatasan lahan, dengan tujuan mengurangi konsentrasi kegiatan di satu kawasan dan pemerataan manfaat pembangunan. Secara umum, tata ruang kota telah menunjukkan pemisahan zona hunian, komersial, dan sosial yang jelas, tetapi masih terdapat lokasi dengan pola ruang yang kurang tertata.



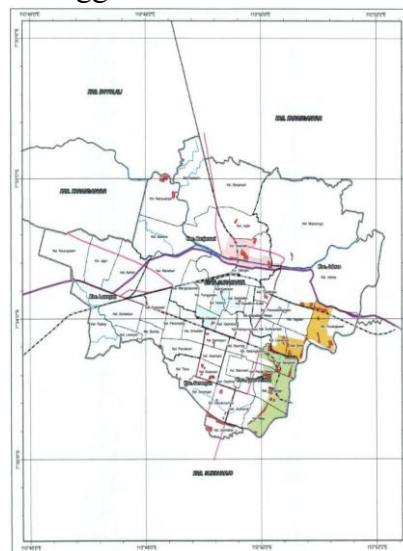
Gambar 3. Peta Penggunaan Lahan Kota Surakarta (Bappeda, 2025)

Peta penggunaan lahan (Gambar 3) menunjukkan bahwa permukiman, perdagangan, dan jasa mendominasi fungsi ruang kota, sementara ruang untuk fungsi ekologis seperti RTH semakin terbatas akibat urbanisasi. Arah kebijakan penataan

ruang Surakarta sudah cukup terstruktur, tetapi realisasinya belum sepenuhnya sesuai, terutama di kawasan berpenduduk padat. Oleh karena itu, desentralisasi dan pembangunan vertikal perlu disertai pemanfaatan lahan sisa secara optimal serta penataan kawasan hunian yang lebih layak dan fungsional.

d. Kualitas Permukiman Kota

Berbagai program telah dijalankan untuk meningkatkan kualitas permukiman di Surakarta, seperti penataan kawasan kumuh, renovasi rumah tidak layak huni (RTLH), dan pembangunan rumah susun, sejalan dengan amanat penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011. Sebagian besar wilayah telah memiliki infrastruktur dasar berupa jalan, air bersih, dan listrik, tetapi kawasan padat dan nonformal, terutama di bantaran rel, masih mengalami sanitasi buruk dan kepadatan tinggi.



Gambar 4. Peta Permukiman Kumuh Kota Surakarta (Pemkot Surakarta, 2025)

Peta permukiman kumuh tahun 2025 (Gambar 4) menunjukkan bahwa kawasan kumuh terkonsentrasi di bagian timur dan selatan kota, terutama di sepanjang koridor transportasi dan bantaran sungai. Tantangan utamanya meliputi keterbatasan akses jalan, buruknya sanitasi, dan persoalan legalitas lahan. Meskipun kualitas permukiman secara umum telah membaik, kawasan padat dan tidak resmi memerlukan penanganan jangka panjang yang struktural dan partisipatif melalui sinergi pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta agar hunian layak dapat dinikmati secara merata.

e. Pelayanan Pangan Kota

Meskipun bukan wilayah penghasil pangan utama, Surakarta berfungsi sebagai pusat distribusi pangan bagi daerah sekitarnya. Ketahanan pangan lokal terjaga melalui strategi logistik yang efektif, dukungan infrastruktur distribusi, dan edukasi publik, termasuk pengembangan pertanian perkotaan skala kecil. Pola pengeluaran konsumsi warga disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas dan Kelompok Pengeluaran di Kota Surakarta (rupiah)

No	Kelompok Komoditas	40% Terbawah	40% Menengah	20% Teratas	Total Rata -rata
1	Padi-padian	55.246	79.212	122.927	78.422
2	Umbi-umbian	2.803	5.165	10.676	5.329
3	Ikan/UDang/Cumi/Kerang	12.265	26.470	69.223	29.385
4	Daging	22.797	34.428	88.500	40.644
5	Telur dan Susu	25.310	42.061	107.352	48.485
6	Sayur-sayuran	37.869	61.081	95.293	58.683
7	Kacang-kacangan	11.173	19.992	27.772	18.033
8	Buah-buahan	14.520	34.112	105.980	40.723
9	Minyak dan Kelapa	9.458	16.270	26.950	15.695
10	Bahan Minuman	12.963	23.546	38.565	23.698
11	Bumbu-bumbuan	7.822	13.255	26.268	13.699
12	Bahan Makanan Lainnya	8.718	13.203	22.684	13.316
13	Makanan dan Minuman Jadi	154.913	310.782	637.565	314.173
14	Rokok dan Tembakau	39.070	67.838	90.250	60.852
	Jumlah Makanan	414.927	747.415	1.470.005	759.775
15	Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga	211.491	459.642	1.194.395	508.120
16	Aneka Barang dan Jasa	79.400	196.255	807.810	272.418
17	Pakaian, Alas Kaki, dan Tutup Kepala	8.478	19.191	61.668	23.444
18	Barang Tahan Lama	5.523	19.156	154.150	40.824
19	Pajak, Pungutan, dan Asuransi	41.234	73.789	188.911	83.911
20	Keperluan Pesta dan Upacara/Kenduri	-	-	45.676	13.647
	Jumlah Bukan Makanan	346.125	779.221	2.452.609	942.364
	Rata-Rata Pengeluaran Kota Surakarta	761.052	1.526.636	3.922.614	1.702.139

Hasil observasi menunjukkan bahwa distribusi pangan di Surakarta berjalan baik dan merata sehingga memperkuat ketahanan pangan rumah tangga. Tabel 1 memperlihatkan bahwa pengeluaran makanan didominasi oleh makanan dan minuman jadi serta padi-padian, dengan kesenjangan yang lebar antarkelompok: pengeluaran makanan kelompok 20% teratas (Rp1.470.005) sekitar 3,5 kali kelompok 40% terbawah (Rp414.927). Artinya, meskipun akses pangan relatif baik, pemerataan kualitas konsumsi masih perlu ditingkatkan, antara lain melalui perluasan pertanian kota berbasis komunitas (urban farming).

f. Pelayanan Pendidikan Kota

Fasilitas pendidikan di Surakarta tersebar cukup merata dan dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat, meskipun masih terdapat disparitas mutu antarsekolah.

Pemerintah daerah berupaya memperkecil kesenjangan tersebut melalui pembangunan sekolah baru dan peningkatan kualitas layanan. Akses fisik menuju sekolah umumnya baik, tetapi jarak tempat tinggal ke sekolah yang bervariasi, terutama bagi anak usia dini, menunjukkan perlunya optimalisasi sistem zonasi.

Tabel 2. Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid per Tingkat Pendidikan di Kota Surakarta Tahun 2023/2024

Tingkat Pendidikan	Jumlah Sekolah	Jumlah Guru	Jumlah Murid
TK	256	1.319	12.061
SD	231	3.983	54.062
SMP	71	2.095	30.511

Tabel 2 menunjukkan bahwa satuan pendidikan didominasi jenjang TK dan SD, dengan jumlah guru dan murid terbanyak pada jenjang SD. Rasio guru per sekolah tertinggi terdapat pada jenjang SMP (sekitar 30 guru per sekolah) karena spesialisasi mata pelajaran. Data ini menunjukkan bahwa mayoritas anak usia sekolah telah terakomodasi hingga jenjang menengah pertama. Meskipun demikian, tantangan masih ada pada kualitas, pemerataan sumber daya, dan sarana pembelajaran.

g. Pelayanan Kesehatan Kota

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu keunggulan utama Surakarta. Pemerintah kota menyediakan berbagai fasilitas, termasuk RSUD yang berkualitas dan program inovatif yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan berupa waktu tunggu layanan dan kualitas pelayanan yang belum merata di fasilitas kesehatan tingkat pertama.

Tabel 3. Jumlah Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, dan Puskesmas Menurut Kecamatan di Kota Surakarta Tahun 2022/2023

Kecamatan	Rumah Sakit Umum		Rumah Sakit Khusus		Puskesmas Rawat Inap	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Laweyan	5	5	3	3	1	1
Serengan	0	0	0	0	0	0
Pasar Kliwon	3	3	0	0	1	1
Jebres	3	3	1	1	1	1
Banjarsari	4	4	0	0	2	2
Surakarta	15	15	4	4	5	5

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Jumlah dan sebaran fasilitas kesehatan tidak berubah selama 2022–2023, yaitu 15 rumah sakit umum, 4 rumah sakit khusus, dan 5 puskesmas rawat inap (Tabel 3). Kecamatan Laweyan memiliki fasilitas paling lengkap, sedangkan Kecamatan Serengan belum memiliki rumah sakit maupun puskesmas rawat inap, yang mencerminkan ketimpangan distribusi layanan. Secara umum pelayanan kesehatan telah memenuhi indikator kota layak huni, tetapi efisiensi antrean dan kapasitas layanan perlu ditingkatkan agar kualitasnya merata.

h. Pelayanan Rekreasi Kota

Pelayanan rekreasi di Surakarta masih menghadapi hambatan dalam menyediakan ruang publik yang merata dan inklusif. Pengembangan taman kota dan ikon budaya terus berlangsung, tetapi keterbatasan lahan menghambat ekspansi fasilitas rekreasi. Observasi menunjukkan bahwa sebagian besar ruang rekreasi yang digunakan merupakan fasilitas lama yang kurang representatif, tetapi tetap dimanfaatkan karena minimnya alternatif. Di sisi lain, sektor pariwisata Surakarta cukup kuat: pada 2024 kota ini menarik lebih dari 4,4 juta wisatawan, 99,7% di antaranya wisatawan domestik. Masjid Raya Sheikh Zayed menjadi daya tarik utama, disusul Solo Safari dan Taman Balekambang, sementara destinasi budaya seperti Pura Mangkunegaran dan Museum Keris masih berskala lokal dan regional. Kondisi ini menuntut revitalisasi fasilitas lama, pemanfaatan ruang potensial, serta promosi pariwisata budaya yang terintegrasi.

i. Pelayanan Transportasi Kota

Pemerintah Kota Surakarta telah menyediakan angkutan umum yang layak dan terjangkau, seperti bus gratis untuk pelajar dan tarif rendah bagi masyarakat umum. Namun, jangkauan trayek masih terbatas dan integrasi antarmoda belum optimal. Observasi menunjukkan bahwa bus feeder belum menjangkau seluruh wilayah, penghapusan beberapa trayek demi efisiensi justru menimbulkan ketimpangan akses di kawasan padat, dan lemahnya konektivitas antara bus utama dan feeder memperpanjang waktu tempuh. Akibatnya, ketergantungan pada kendaraan pribadi tetap tinggi, didorong pula oleh kemudahan pembiayaan dan promosi kendaraan listrik. Pada 2024, panjang jalan kabupaten/kota bertambah menjadi 232,73 km, sedangkan jalan provinsi menurun drastis, yang menandakan dominasi peran pemerintah daerah dalam pengelolaan jaringan jalan. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan jaringan transportasi yang terintegrasi serta sinergi antara pengelolaan jalan dan angkutan umum untuk menekan penggunaan kendaraan pribadi.

j. Pelayanan Kelistrikan Kota

Pelayanan kelistrikan di Surakarta tergolong baik, ditandai pasokan yang stabil dan gangguan teknis yang jarang terjadi, didukung pembangunan jaringan bawah tanah yang sekaligus memperbaiki tampilan visual kota. Jumlah pelanggan listrik pada 2023–2024 meningkat di semua kategori, terutama rumah tangga, bisnis, dan sosial, seiring pertumbuhan permukiman dan aktivitas ekonomi. Namun, observasi menunjukkan bahwa kabel listrik di kawasan padat dan permukiman lama masih semrawut—meskipun tidak membahayakan secara langsung—dan penerangan jalan umum belum optimal. Penataan jaringan listrik dan optimalisasi penerangan jalan perlu menjadi agenda lintas sektor.

k. Pelayanan Air Minum Kota

Cakupan layanan PDAM telah mencapai sekitar 97% wilayah kota. Air bersih tersedia dan mencukupi untuk kebutuhan harian, tetapi kualitasnya belum memenuhi standar konsumsi langsung sehingga warga masih perlu mengolahnya sebelum diminum, khususnya di kawasan padat dan berinfrastruktur tua. Data distribusi 2024 menunjukkan bahwa Pasar Kliwon, Laweyan, dan Jebres menyerap lebih dari 70% total pasokan, sedangkan Banjarsari dan Serengan menerima porsi lebih kecil, kemungkinan karena keterbatasan jaringan atau adanya sumber air alternatif. Sekitar 12,70% distribusi bahkan dialirkan ke luar kota, yang menandakan peran regional Perumda Air Minum. Pemerataan distribusi berbasis kebutuhan aktual dan peningkatan kualitas air masih diperlukan.

l. Partisipasi Kota

Kolaborasi masyarakat dan pemerintah di Surakarta terlihat dari berbagai inisiatif warga, seperti pembangunan taman kecil secara swadaya, mural bertema lingkungan, dan papan informasi komunitas, yang dilakukan tanpa insentif langsung dan berlandaskan semangat gotong royong. Tingkat partisipasi warga tergolong tinggi dan konsisten, baik dalam perencanaan pembangunan maupun kegiatan sosial, didukung ruang partisipasi yang terbuka dari pemerintah. Hal ini memperkuat legitimasi kebijakan, meskipun kualitas dan kesetaraan kapasitas warga dalam berpartisipasi masih perlu ditingkatkan.

m. Kemampuan Memiliki Rumah

Sebagian besar rumah di Surakarta telah memenuhi standar kelayakan dasar, tetapi keberadaan kawasan kumuh di sekitar rel kereta api dan permukiman padat mencerminkan ketimpangan antara warga yang mampu membeli rumah dan mereka yang tinggal di kawasan informal. Persentase penduduk miskin memang turun dari 11,74% (2013) menjadi 8,31% (2024), tetapi garis kemiskinan naik dari Rp403.121 menjadi Rp638.102, yang menandakan meningkatnya biaya hidup. Masyarakat berpenghasilan rendah semakin sulit mengakses hunian layak akibat kenaikan harga properti dan masih bergantung pada rumah kontrakan kecil atau bantuan pemerintah. Program rusun, RTLH, dan relokasi telah berjalan, tetapi tantangan utama tetap terletak pada keterjangkauan harga dan keterbatasan lahan, sehingga diperlukan kebijakan terpadu seperti pengendalian harga tanah dan insentif bagi pengembang.

n. Kesempatan Bekerja

Aktivitas ekonomi lokal Surakarta cukup dinamis, digerakkan oleh sektor informal seperti UMKM, warung makan, pedagang pasar, serta jasa dan transportasi, yang membuka peluang berwirausaha meskipun sebagian besar pelakunya belum berpenghasilan tetap. Tingginya jumlah pekerja dari luar kota menunjukkan daya serap pasar kerja yang besar sekaligus memperketat persaingan bagi penduduk lokal. Pengangguran didominasi lulusan SMA/SMK (65,29% laki-laki dan 43,67% perempuan), sedangkan pada lulusan perguruan tinggi proporsi perempuan jauh lebih tinggi (56,33%) dibandingkan laki-laki (14,84%). Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan tinggi belum menjamin pekerjaan, terutama bagi perempuan, sehingga diperlukan pelatihan keterampilan, dukungan kewirausahaan, dan perluasan pasar kerja yang inklusif.

o. Keamanan Kejahatan Kota

Pemasangan CCTV telah dilakukan di sejumlah titik strategis sebagai bagian dari program smart city, meskipun sebarannya belum merata dan tengah diakselerasi

menuju target 1.000 titik. Pendekatan keamanan berbasis teknologi ini sejalan dengan penurunan kasus kejahatan dari 786 kasus pada 2019 menjadi 346 kasus pada 2023. Laweyan dan Serengan hanya mencatat 2 dan 10 kasus pada 2023, sedangkan data Jebres dan Banjarsari tidak tersedia dalam dua tahun terakhir, kemungkinan karena perubahan sistem pelaporan atau integrasi data ke tingkat Polresta Surakarta. Karena penurunan angka kejahatan dapat dipengaruhi oleh perbaikan nyata maupun perbedaan pencatatan, pemantauan berkelanjutan tetap diperlukan. Secara umum, Surakarta telah memenuhi indikator keamanan melalui kombinasi strategi teknologi dan pendekatan sosial yang perlu terus didukung edukasi dan partisipasi masyarakat.

p. Keamanan Bencana Kota

Genangan dan banjir masih terjadi di beberapa titik saat hujan deras, meskipun kapasitas sistem drainase sebenarnya cukup memadai; penyebab utamanya adalah bangunan liar yang menghalangi aliran air. Secara umum risiko bencana di Surakarta rendah, tetapi Kecamatan Jebres (termasuk Mojosongo) serta bagian timur dan utara kota termasuk zona bahaya sedang yang memerlukan mitigasi lebih intensif. Surakarta telah memiliki fondasi penanggulangan banjir yang kuat melalui kebijakan, kerja sama lintas lembaga, dan inovasi fisik seperti rumah panggung, tetapi pelaksanaannya masih lemah dalam pemeliharaan drainase dan perilaku masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan risiko bencana perlu dilakukan secara spasial sesuai karakteristik kawasan, dengan memperkuat aspek teknis dan kultural secara seimbang.

D. KESIMPULAN

Evaluasi terhadap 28 indikator MLCI (IAP, 2022) menunjukkan bahwa indikator tersebut dapat disederhanakan menjadi 16 indikator utama yang selaras dengan kerangka EIU (2019) dan Kashef (2016). Penyederhanaan ini menghindari duplikasi data, mempermudah evaluasi, mendukung perumusan kebijakan yang lebih efektif, meningkatkan pemahaman publik terhadap hasil penilaian, serta menghemat waktu dan biaya pengumpulan data. Pengelompokan seperti "Pelayanan Transportasi Kota" juga mempertajam fokus pada konektivitas dan kebijakan transportasi yang berkelanjutan dan inklusif.

Evaluasi kondisi eksisting menunjukkan bahwa Surakarta unggul pada pelayanan kesehatan, pendidikan, kelistrikan, air bersih, partisipasi warga, dan keamanan, tetapi belum memenuhi kriteria kelayakan secara menyeluruh. Kesenjangan terbesar terdapat pada RTH publik yang baru sekitar 9% dari luas wilayah, jauh di bawah ketentuan nasional dan target RTRW, serta pada akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Persoalan lainnya meliputi kualitas udara yang belum merata, permukiman kumuh, dan integrasi transportasi publik yang lemah. Dengan demikian, predikat "layak huni" secara administratif belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil, sehingga indikator penilaian perlu disempurnakan agar lebih kontekstual dan inklusif, disertai strategi pembangunan yang adaptif agar kelayakan huni dapat dirasakan secara merata oleh seluruh warga.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Kota Surakarta. (2024). Kota Surakarta Dalam Angka 2024. Surakarta: BPS Kota Surakarta.

- Douglass, M. (2002). From global intercity competition to cooperation for livable cities and economic resilience in Pacific Asia. *Environment and Urbanization*, 14(1), 53–68.
- Economist Intelligence Unit (EIU). (2019). The Global Liveability Index 2019: A Free Overview. London: The Economist Intelligence Unit. https://www.greenme.it/wp-content/uploads/2019/09/report_citta_piuvivibili.pdf
- Evans, P. (Ed.). (2002). *Livable Cities? Urban Struggles for Livelihood and Sustainability*. Berkeley: University of California Press.
- Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP). (2022). *Indonesia's Most Livable City Index 2022*. Jakarta: IAP.
- Kashef, M. (2016). Urban livability across disciplinary and professional boundaries. *Frontiers of Architectural Research*, 5(2), 239–253.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.